



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : I NYOMAN SUWANDIASA  
NIK : 5271060908710001  
Lembaga : PEMERINTAH KOTA MATARAM  
Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jabatan : KEPALA DINAS  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 11 Januari 2023

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA MATARAM  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN SUWANDIASA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 89573

**ii. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/90 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	135.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV RE12WD 2.0/AT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA/[030]A1F02N36M1 A/T SPM R 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	44.405.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	47.136.061
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.326.541.061
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	12.366.333
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.314.174.728

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.